

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PELAKSANAAN SISTEM INFORMASI AKADEMIK (SIKAD) BERBASIS WEB KEPADA MAHASISWA DI UNIVERSITAS KAPUAS SINTANG

Firdaus Rinaldi

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Kapuas Sintang, Jl. Y.C. Oevang Oeray No. 92, Sintang, Indonesia, email: Firdaus.rinaldi13@gmail.com

Abstract: *The title of this research is: Implementation of the Web-Based Academic Information System (Siakad) Policy among the students of Universitas Kapuas Sintang (Kapuas University in Sintang). The problem lies in the fact that not every student and lecturer has sufficient technological skills to use Siakad optimally, and the training and socialization processes concerning the use of Siakad among students, lecturers, and academic staff are still scarce. This study aims to describe and analyze the implementation process of the web-based Academic Information System (Siakad) policy among students at Universitas Kapuas Sintang, through the aspects of organization, interpretation, and application. The research findings indicate that in terms of organization, the structure and human resources are ready, but not optimized, especially in terms of human resources preparedness in mastering technology. In terms of interpretation, the policy has been socialized through training and guidelines, but there are still differences in perception in terms of system utilization. Meanwhile, in terms of application, the system has been applied and utilized in academic procedures, including completing the Study Plan Card (KRS) and obtaining the Study Outcome Card (KHS), even though technical and network access issues still occur. This research concludes that the web-based Siakad policy at Universitas Kapuas Sintang has been implemented, although it requires optimization in terms of human resource training, infrastructure improvement, and regular review of the system. It is recommended that the University should improve internal coordination and technical support to users to make this policy implementation more effective.*

Keywords: *Implementation; Policy; Siakad; Web-Based.*

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan pelaksanaan Sistem Informasi Akademik (Siakad) Berbasis Web kepada Mahasiswa di Universitas Kapuas Sintang. Permasalahan bersumber pada tidak semua mahasiswa maupun dosen memiliki kemampuan teknologi yang memadai untuk menggunakan Siakad secara optimal dan minimnya kegiatan pelatihan dan sosialisasi penggunaan Siakad bagi mahasiswa, dosen, dan tenaga kependidikan masih terbatas. Tujuan penelitian ini adalah ingin menggambarkan dan menganalisis proses implementasi kebijakan pelaksanaan Sistem Informasi Akademik (Siakad) Berbasis Web Kepada Mahasiswa di Universitas Kapuas Sintang, dilihat dari tahap pengorganisasian, interpretasi dan aplikasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada aspek organisasi, struktur dan sumber daya manusia sudah disiapkan namun belum sepenuhnya optimal, terutama pada kesiapan SDM dalam penguasaan teknologi. Pada aspek interpretasi, kebijakan telah disosialisasikan melalui pelatihan dan panduan, namun masih ditemukan perbedaan persepsi dalam pemanfaatan sistem. Sedangkan pada aspek aplikasi, sistem telah berjalan dan digunakan dalam proses akademik, seperti pengisian KRS dan pengambilan KHS, meskipun masih terdapat kendala teknis dan akses jaringan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa implementasi kebijakan Siakad berbasis web di Universitas Kapuas Sintang sudah berjalan, namun perlu dilakukan optimalisasi dari segi pelatihan SDM, peningkatan infrastruktur, serta

evaluasi berkala terhadap sistem. Rekomendasi diberikan agar universitas lebih memperkuat koordinasi internal dan pendampingan teknis kepada pengguna untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan kebijakan ini

Kata Kunci: Implementasi; Kebijakan; Siakad; Berbasis Web.

PENDAHULUAN

Universitas Kapuas dalam rangka kelancaran pelaksanaan pengembangan Akademik memperkenalkan website Sistem Informasi Akademik (Siakad) 4.0 Universitas Kapuas yang mana memudahkan bagi pengguna untuk mencari sebuah informasi akademik. Seperti dalam Kartu Rencana Studi (KRS), mahasiswa dapat melakukan pengisian KRS dari mana dan kapan saja melalui komputer yang tersambung dengan koneksi internet. Mahasiswa juga tidak perlu lagi antri meminta blanko dan menuliskan matakuliah yang akan diajukan, namun tinggal menandai matakuliah yang akan diajukan didalam website resmi (siakad.unka.ac.id). Perkembangan ini disebabkan karena bertambah rumitnya berbagai masalah yang harus dihadapi oleh mahasiswa dan harus diselesaikan dalam waktu yang cepat dan singkat.

Pelaksanaan Sistem Informasi Akademik (Siakad) berbasis web di Universitas Kapuas Sintang merupakan salah satu langkah strategis dalam mendukung digitalisasi layanan akademik. Sejak diimplementasikan secara bertahap mulai tahun 2020, sistem ini mulai menggantikan proses manual dalam pengisian KRS, pengambilan nilai, pencetakan KHS, dan layanan administrasi akademik lainnya. Pada awal pelaksanaan, penggunaan Siakad oleh mahasiswa masih tergolong rendah. Banyak mahasiswa mengalami kesulitan

dalam mengakses dan memahami alur sistem, terutama mereka yang berasal dari wilayah dengan keterbatasan jaringan internet. Kurangnya sosialisasi dan pelatihan juga menjadi faktor penghambat adaptasi terhadap sistem ini. Namun, dari tahun ke tahun, tingkat penggunaan Siakad menunjukkan peningkatan signifikan. Mahasiswa mulai terbiasa dengan prosedur online, terutama karena kebutuhan akademik seperti pengisian KRS dan pengecekan nilai tidak lagi dilakukan secara langsung ke bagian akademik, melainkan melalui akun Siakad masing-masing.

Untuk mengetahui tingkat partisipasi mahasiswa dalam penggunaan Siakad dari tahun 2021/2022 - 2023/2024, dapat dilihat pada Tabel 1.1 berikut ini.

Tabel 1 Data Penggunaan Siakad oleh Mahasiswa Universitas Kapuas Sintang

No	Tahun Akademik	Jumlah Mahasiswa Aktif	Mahasiswa yang Mengakses Siakad	Kendala Umum
1	2021/2022	2.400	78%	Login error, panduan tidak jelas
2	2022/2023	2.500	88%	Masalah reset password
3	2023/2024	2.520	93%	Stabilitas server saat KRS

Sumber: Bagian Akademik Universitas Kapuas Sintang, Tahun 2025

Berdasarkan Tabel 1. menunjukkan bahwa data penggunaan Siakad oleh Mahasiswa Universitas Kapuas Sintang meningkat sekitar 78% pada tahun 2021/2022 menjadi lebih dari 93% pada tahun akademik 2023/2024. Fitur-fitur utama yang dimanfaatkan oleh mahasiswa seperti: Pengisian dan pengubahan KRS, Pengecekan nilai per semester, Cetak KHS dan transkrip sementara, Akses pengumuman akademik, Pemantauan status pembayaran dan administrasi lainnya. Ini menunjukkan bahwa sistem ini sudah menjadi bagian penting dari aktivitas akademik mahasiswa sehari-hari

Meski demikian, masih terdapat beberapa tantangan teknis yang perlu dibenahi, seperti: Gangguan akses saat masa pengisian KRS akibat lonjakan traffic, Kesulitan reset password, Kurangnya versi mobile yang optimal dan keterbatasan literasi digital pada mahasiswa baru. Secara umum, mahasiswa Universitas Kapuas Sintang menerima dengan baik pelaksanaan Siakad berbasis web karena dirasa lebih praktis, efisien, dan mendukung transparansi layanan akademik. Mereka juga berharap adanya peningkatan layanan, baik dari sisi teknis sistem maupun dukungan operasional dari pihak kampus.

Pelaksanaan layanan Sistem Informasi Akademik 4.0 sangat diperlukan sekali untuk membantu proses kegiatan akademik mahasiswa. Namun fakta yang ada saat ini Sistem Informasi Akademik yang ada di Universitas Kapuas Sintang masih

mengalami masalah yang belum ada pembenahan atau perbaikan. Masalah yang paling utama adalah lambatnya penginputan nilai dari dosen matakuliah ke sistem portal akademik sesuai waktu yang telah diberikan, keterlambatan proses penginputan nilai ini dikarenakan satu dosen mengajar lebih dari satu matakuliah sehingga proses penginputan membutuhkan waktu lebih, kemudian tidak dipungkiri ada beberapa dosen yang tidak mahir mengoperasikan komputer sehingga proses penginputan nilai tersebut dilimpahkan kembali kepada operator, keterlambatan ini akan mempengaruhi operator SIA untuk dapat menawarkan mata kuliah pada semester berikutnya

Implementasi yang merupakan terjemahan dari kata implementation, berasal dari kata kerja to implement. Bauer & Kirchner (2020:3) mengemukakan bahwa, implementation as a specified set of activities designed to put into practice an activity or program. Dalam pandangan modern, istilah "melengkapi" (to fill up) kini dimaknai sebagai upaya sistematis untuk memastikan suatu program benar-benar terapkan dan menetap dalam praktik keseharian organisasi. Albers et al. (2020:108) menyatakan bahwa, implementation is the purposeful transition from a decision to adopt an intervention to its actual use. Secara etimologis modern, implementasi diartikan sebagai jembatan yang menghubungkan niat (rencana) dengan penggunaan nyata, guna mencapai hasil yang diharapkan secara penuh. dapat disimpulkan bahwa implementasi dalam

perspektif modern bukan lagi sekadar pemenuhan aspek administratif untuk "mengisi" celah kebijakan, melainkan sebuah proses transisi strategis yang sistematis. Implementasi berfungsi sebagai jembatan operasional yang mengubah niat atau keputusan rencana menjadi penggunaan nyata di lapangan melalui serangkaian aktivitas terencana. Dalam konteks ini, makna "melengkapi" telah berevolusi menjadi upaya untuk memastikan bahwa sebuah inovasi atau program tidak hanya diterapkan secara teknis, tetapi juga terintegrasi secara mendalam dan menetap menjadi praktik keseharian dalam sistem organisasi guna mencapai hasil yang diharapkan secara penuh dan berkelanjutan. Sehubungan dengan kata implementasi di atas, Nilsen (2020:12) mengemukakan bahwa, *implementation as a specified set of activities designed to put into practice an activity or program*. Maksudnya adalah sekumpulan aktivitas terencana untuk menerapkan, mengintegrasikan, dan menjalankan program dalam dimensi yang nyata. Jadi, implementasi kini dipandang sebagai proses sistematis untuk memastikan suatu inovasi atau kebijakan dapat bekerja secara fungsional dalam lingkungan tertentu.

Implementasi kebijakan publik merupakan satu tahap penting dalam proses kebijakan, yaitu suatu proses untuk membuat suatu yang formal bisa terselenggara di lapangan oleh aktor sehingga memberi hasil. Meter dan Horn (dalam Winarno, 2012:21), membatasi implementasi kebijakan sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu/kelompok, pemerintah

maupun swasta yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan. Tidak semua kebijakan memerlukan proses implementasi, ada kebijakan yang secara otomatis akan terimplementasi dengan sendirinya begitu kebijakan tersebut diputuskan atau yang disebut *self-implementation*.

Implementasi adalah suatu kegiatan yang dimaksudkan untuk mengopersikan sebuah program, dengan tiga tahap sebagai pilarnya, Charles O. Jones, (dalam Winarno, 2012:35) yaitu:

1. Tahap Pengorganisasian, yaitu menyangkut pembentukan atau penataan kembali sumber daya, unit-unit dan metode untuk menjadikan program.
2. Tahap Interpretasi/pemahaman, yaitu menafsirkan agar program menjadi rencana dan pengarahan yang tepat dan dapat diterima serta dilaksanakan.
3. Tahap Aplikasi/pelaksanaan, yaitu ketentuan rutin dari pelayanan, pembayaran atau lainnya yang disesuaikan dengan tujuan program.

Berdasarkan apa yang Charles O. Jones tersebut, menunjukkan bahwa dapat memberikan kerangka analisis yang sistematis dan menyeluruh terhadap proses implementasi kebijakan, mulai dari aspek struktur kelembagaan (pengorganisasian), karena tahap ini membantu menilai apakah pihak kampus sudah menyiapkan struktur organisasi dan SDM yang mendukung keberhasilan implementasi sistem.

Pemahaman pelaksana dan pengguna kebijakan (interpretasi), karena tahap ini memungkinkan peneliti menilai sejauh mana mahasiswa memahami cara penggunaan Siakad, serta bagaimana sosialisasi dan pelatihan dilakukan oleh kampus. Hasil pelaksanaannya di lapangan (aplikasi). Karena, tahap ini penting untuk menilai hasil nyata dari kebijakan, seperti tingkat partisipasi mahasiswa dalam menggunakan Siakad, kemudahan akses, serta efektivitas pelayanan akademik yang dirasakan. Ketiga tahap tersebut sangat sesuai untuk mengkaji kebijakan teknologi informasi seperti Siakad, yang keberhasilannya sangat bergantung ketiga tahapan tersebut.

Implementasi kebijakan merupakan proses kajian yang mencakup lima komponen dan setiap komponen dapat berubah menjadi komponen yang lain melalui prosedur metodologi tertentu, seperti perumusan masalah, peramalan, rekomendasi, pemantauan dan evaluasi. Sebagai contoh prosedur peramalan akan menghasilkan masa depan kebijakan dan rekomendasi akan melahirkan aksi kebijakan serta evaluasi akan melahirkan kinerja kebijakan (Subarsono 2012:18). Menurut Anderson (dalam Islamy 2009:19) mengartikan bahwa Kebijakan Publik sebagai serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh pelaku atau sekelompok pelaku guna memecahkan masalah tertentu.

Selanjutnya pelaksanaan suatu kegiatan dapat diartikan menurut Indiahono (2009:91) sebagai berikut:

1. Proses cara, perbuatan mengelola, mengendalikan, menyelenggarakan, mengurus dan menjelaskan.
2. Proses melakukan kegiatan tertentu dengan mengerahkan tenaga orang lain.
3. Proses yang membantu merumuskan kebijaksanaan dan tujuan organisasi.
4. Proses yang memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelkebijaksanaan dan pencapaian tujuan.

Berdasarkan dari pernyataan Indiahono bahwa Implementasi kebijakan bukanlah sekedar berkaitan dengan mekanisme penjabaran keputusan-keputusan ke dalam prosedur-prosedur rutin lewat saluran-saluran birokrasi, melainkan lebih dari itu, ia menyangkut masalah konflik, keputusan dan siapa yang memperoleh apa dari implementasi kebijakan merupakan tahap yang sangat penting dalam keseluruhan proses kebijakan.

Implementasi Pelaksanaan Siakad berbasis web di Universitas Kapuas Sintang telah membawa dampak positif dalam meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam administrasi akademik. Dengan sistem ini, mahasiswa dapat lebih mudah mengakses informasi akademik, sedangkan dosen dan pihak universitas dapat lebih efektif dalam mengelola data akademik. Meskipun terdapat tantangan dalam hal infrastruktur dan adopsi teknologi, pelatihan dan dukungan yang

berkelanjutan dapat mengatasi hambatan tersebut. Ke depannya, Siakad berbasis web dapat terus dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan akademik yang lebih kompleks dan mendukung peningkatan kualitas pendidikan di universitas

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Menurut Moleong (2010:29) penelitian deskriptif, adalah menggambarkan fenomena-fenomena yang terjadi dilapangan secara apa adanya, selanjutnya ditarik kesimpulan, guna mendapatkan suatu teori dan lebih mementingkan proses daripada hasil. Berdasarkan pendapat tersebut menunjukkan bahwa penelitian deskriptif adalah cara menggambarkan atau melukiskan gejala berdasarkan data dan fakta secara aktual pada saat penelitian berlangsung di lapangan sebagaimana adanya, sesuai dengan tujuan penelitian. Berdasarkan dari pendapat tersebut, maka dalam penelitian ini akan berupaya untuk mendiskripsikan berbagai hal menyangkut masalah Implementasi kebijakan pelaksanaan Sistem Informasi Akademik (Siakad) berbasis web di Universitas Kapuas Sintang.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Tahap Pengorganisasian

Menurut Charles O. Jones (dalam teori implementasi kebijakan), tahap pengorganisasian merupakan salah satu variabel penting yang

menentukan keberhasilan pelaksanaan kebijakan. Pengorganisasian mencakup upaya untuk menetapkan struktur, membagi peran, menentukan wewenang, serta mengoordinasikan tugas di antara pihak-pihak yang terlibat agar tujuan kebijakan dapat tercapai secara efektif. Dalam konteks implementasi Kebijakan Sistem Informasi Akademik (Siakad) berbasis web di Universitas Kapuas Sintang, prinsip pengorganisasian ini tampak jelas dalam pembentukan sistem kerja dan pembagian tugas antarunit pelaksana.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Universitas Kapuas Sintang telah membentuk Tim Teknologi Informasi (TI) dan Tim Layanan Akademik sebagai dua unsur utama dalam mengelola Siakad. Tim TI bertanggung jawab pada aspek teknis, seperti pemeliharaan server, pembaruan aplikasi, dan penguatan keamanan sistem. Sementara itu, Tim Layanan Akademik berperan dalam pendampingan mahasiswa, pengelolaan data akademik, serta penyusunan panduan penggunaan Siakad. Struktur ini memperlihatkan penerapan konsep Jones yang menekankan pentingnya *division of labor* (pembagian kerja) agar setiap unit memiliki fokus kerja yang spesifik dan saling mendukung.

Selain pembagian tugas, koordinasi antar biro juga menjadi faktor kunci. Jones menegaskan bahwa organisasi pelaksana kebijakan memerlukan koordinasi yang intensif agar setiap

bagian dapat saling melengkapi dalam mencapai tujuan bersama. Di Universitas Kapuas Sintang, koordinasi dilakukan melalui rapat rutin antara pimpinan universitas, operator fakultas, dan tim teknis untuk mengevaluasi kelancaran sistem, terutama pada masa-masa kritis seperti pendaftaran semester dan pengisian Kartu Rencana Studi (KRS). Pola koordinasi ini terbukti membantu dalam mengidentifikasi kendala teknis, misalnya gangguan jaringan atau kesalahan input data, sehingga solusi dapat diambil secara cepat.

Namun, meskipun tahap pengorganisasian telah berjalan cukup baik, penelitian juga menemukan beberapa tantangan yang relevan dengan teori Jones. Misalnya, keterbatasan jumlah tenaga operator di beberapa fakultas menyebabkan beban kerja tidak merata, terutama saat periode registrasi mahasiswa baru. Kondisi ini sesuai dengan pandangan Jones bahwa pengorganisasian yang tidak seimbang dapat menimbulkan hambatan implementasi, seperti keterlambatan layanan dan ketergantungan berlebih pada unit tertentu. Tahap pengorganisasian yang baik menjadi faktor kunci keberhasilan implementasi kebijakan Siakad berbasis web. Dengan adanya struktur tim yang jelas dan pembagian tugas yang terarah, proses pengelolaan sistem dapat berjalan lebih efektif. Hal ini sejalan dengan teori organisasi kebijakan

yang menyatakan bahwa pelaksanaan kebijakan memerlukan koordinasi antar unit kerja agar tujuan dapat tercapai secara optimal. Pengorganisasian di Universitas Kapuas Sintang telah mendukung proses implementasi, meskipun perlu peningkatan dalam koordinasi lintas fakultas untuk mempercepat penyelesaian gangguan teknis.

Terkait dengan hasil wawancara dapat diasumsikan bahwa esensi dari keberadaan Peraturan Rektor UNKA Sintang Nomor 01 Tahun 2014 tentang Penggunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi di Lingkungan UNKA Sintang (Peraturan Rektor UNKA Sintang Nomor 01 Tahun 2014) secara organisasi adalah untuk mengubah paradigma pelayanan publik menuju yang lebih efisien, responsif, transparan, dan meningkatkan kepuasan mahasiswa. Ini sejalan dengan upaya untuk membangun tata kelola pemerintahan yang baik dan memberikan nilai tambah yang signifikan bagi pemerintah daerah dan mahasiswa yang dilayani. Peraturan ini juga menetapkan atau mengatur ulang struktur organisasi yang lebih fokus dan terorganisir untuk mendukung pelaksanaan Kebijakan Siakad Berbasis Web Kepada Mahasiswa, termasuk penunjukan tim khusus, pemilihan pemimpin tim, serta penugasan tugas dan tanggung jawab masing-masing anggota tim untuk memastikan pelaksanaan kebijakan berjalan lancar. Kemudian dengan

adanya peraturan ini, penggunaan sumber daya seperti perangkat keras, perangkat lunak, dan tenaga kerja dapat dioptimalkan untuk mendukung proses pelayanan yang lebih efisien dan berkualitas. Pengelolaan sumber daya yang baik akan mendukung kelancaran operasional dan keberhasilan implementasi kebijakan.

2. Tahap Interpretasi/Pemahaman

Menurut Charles O. Jones, salah satu faktor penting dalam keberhasilan implementasi kebijakan adalah tahap interpretasi atau pemahaman (interpretation). Jones menekankan bahwa pelaksana kebijakan, sasaran kebijakan, dan pemangku kepentingan harus memiliki pemahaman yang sama mengenai tujuan, isi, dan prosedur kebijakan agar tidak terjadi kesalahan penerapan di lapangan. Interpretasi yang tepat memungkinkan setiap pihak memahami apa yang harus dilakukan, bagaimana cara melakukannya, dan mengapa kebijakan tersebut penting, sehingga implementasi dapat berjalan sesuai dengan maksud perumus kebijakan. Dalam konteks pelaksanaan kebijakan Sistem Informasi Akademik (Siakad) berbasis web di Universitas Kapuas Sintang, hasil penelitian menunjukkan bahwa proses interpretasi kebijakan telah dilakukan melalui berbagai bentuk sosialisasi, seperti penyebaran informasi melalui media kampus, penyelenggaraan pelatihan, dan

pemberian panduan penggunaan Siakad kepada mahasiswa dan dosen. Upaya ini membantu menciptakan pemahaman awal bahwa kebijakan Siakad bertujuan untuk mempermudah pelayanan akademik, meningkatkan transparansi, dan mempercepat proses administrasi seperti pengisian Kartu Rencana Studi (KRS), pengecekan nilai, dan registrasi mahasiswa.

Berdasarkan temuan penelitian juga menunjukkan adanya perbedaan tingkat pemahaman antara kelompok pengguna. Mahasiswa tingkat akhir, misalnya, cenderung lebih cepat memahami sistem karena telah terbiasa menggunakan layanan digital kampus. Sebaliknya, mahasiswa baru dan sebagian tenaga kependidikan yang belum terbiasa dengan aplikasi daring membutuhkan bimbingan lebih intensif. Kondisi ini sesuai dengan pandangan Jones bahwa interpretasi kebijakan dapat bervariasi tergantung pada latar belakang pengalaman, literasi teknologi, dan akses informasi dari masing-masing aktor.

Selain itu, pemahaman kebijakan juga dipengaruhi oleh kejelasan pedoman teknis yang disediakan universitas. Jones menegaskan bahwa ketidakjelasan instruksi dapat menimbulkan ambiguitas yang menghambat pelaksanaan kebijakan. Dalam kasus Universitas Kapuas Sintang, meskipun pedoman penggunaan SIAKAD sudah

tersedia, beberapa mahasiswa melaporkan kebingungan pada tahap awal pendaftaran akun dan proses pengisian KRS, terutama ketika terjadi gangguan jaringan. Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan interpretasi tidak hanya bergantung pada sosialisasi, tetapi juga pada kualitas komunikasi kebijakan yang harus jelas, sederhana, dan mudah diakses.

Interpretasi terhadap Peraturan Rektor UNKA Sintang Nomor 01 Tahun 2014 mempunyai peran strategis untuk meningkatkan efisiensi dalam pelayanan publik dengan menetapkan target agar proses penerbitan dokumen administrasi seperti kartu keluarga, akta kelahiran, dan dokumen kependudukan lainnya dapat diselesaikan dalam satu hari kerja. Dengan demikian, mahasiswa tidak perlu menunggu terlalu lama untuk mendapatkan dokumen yang mereka butuhkan. Dengan adanya Kebijakan Siakad Berbasis Web Kepada Mahasiswa ini, diharapkan bahwa pelayanan kepada mahasiswa menjadi lebih responsif dan cepat. Dokumen administrasi yang diperlukan dapat diproses dan diterbitkan dengan lebih cepat, mengurangi birokrasi dan mempercepat respon terhadap kebutuhan mahasiswa.

3. Tahap Aplikasi/Penerapan

Teori implementasi kebijakan, Charles O. Jones menegaskan bahwa application (penerapan) merupakan

tahap penting setelah proses pengorganisasian dan interpretasi dilakukan. Penerapan berkaitan dengan bagaimana kebijakan dilaksanakan secara nyata di lapangan, yaitu sejauh mana keputusan dan aturan yang telah ditetapkan dapat dijalankan sesuai dengan rencana, serta bagaimana sistem tersebut memberikan dampak langsung kepada sasaran kebijakan. Dengan kata lain, penerapan adalah wujud konkret dari kebijakan yang dapat diukur melalui aktivitas, layanan, dan hasil yang diterima oleh masyarakat atau kelompok sasaran.

Pembahasan dari hasil penelitian mengenai pelaksanaan kebijakan Sistem Informasi Akademik (Siakad) berbasis web di Universitas Kapuas Sintang menunjukkan bahwa proses aplikasi kebijakan telah berjalan melalui beberapa aktivitas utama. Mahasiswa menggunakan Siakad untuk registrasi semester, pengisian Kartu Rencana Studi (KRS), pengecekan nilai, pemantauan kehadiran kuliah, dan pembayaran administrasi akademik secara daring. Fitur-fitur ini menjadi implementasi nyata dari kebijakan digitalisasi pelayanan akademik yang ditetapkan universitas. Setiap semester, mahasiswa diharuskan mengakses Siakad untuk melakukan seluruh proses administrasi, sehingga sistem ini telah menjadi bagian integral dari manajemen akademik kampus.

Penerapan kebijakan ini juga mencakup dukungan infrastruktur dan layanan teknis yang disiapkan pihak universitas. Tim Teknologi Informasi (TI) melakukan pemeliharaan server secara rutin, menyediakan ruang laboratorium komputer sebagai pusat layanan, serta menambah kapasitas jaringan internet untuk mengantisipasi lonjakan akses, terutama pada periode pengisian KRS. Upaya ini mencerminkan prinsip Jones bahwa penerapan kebijakan tidak hanya menuntut pelaksanaan aturan, tetapi juga ketersediaan sarana, sumber daya, dan tindakan nyata untuk memastikan kebijakan berjalan sesuai tujuan.

Meski demikian, penelitian menemukan beberapa kendala dalam penerapan Siakad, seperti gangguan jaringan internet, keterbatasan perangkat bagi sebagian mahasiswa, serta keterlambatan pembaruan data pada saat puncak pendaftaran. Kendala ini sejalan dengan pandangan Jones yang menyatakan bahwa dalam tahap aplikasi sering muncul hambatan teknis atau administratif yang dapat memengaruhi efektivitas kebijakan. Universitas merespons masalah ini dengan memperkuat kapasitas server, menambah tenaga operator, dan memberikan layanan bantuan langsung kepada mahasiswa yang mengalami kesulitan teknis.

Universitas Kapuas Sintang perlu meninjau kembali prosedur-

prosedur yang ada untuk memastikan bahwa dokumen administrasi seperti Membantu mahasiswa yang mengalami kendala login, lupa password, atau kesalahan data di akun Siakad. Ini tentunya melibatkan penyederhanaan formulir, penggunaan teknologi informasi untuk mempercepat pengolahan data, dan peningkatan koordinasi antar bagian di dalam dinas. Termasuk di dalamnya adalah memastikan ketersediaan personel yang cukup dan terlatih untuk menangani volume permohonan yang lebih besar dalam waktu singkat. Hal ini juga bisa mencakup peningkatan infrastruktur fisik dan teknologi untuk mendukung operasional implementasi Kebijakan Siakad Berbasis Web Kepada Mahasiswa.

KESIMPULAN DAN SARAN

Dari hasil penelitian dan pembahasan yang diuraikan, dapat ditarik beberapa kesimpulan, antara lain:

1. Tahap pengorganisasian dalam proses implementasi kebijakan Pelaksanaan Sistem Informasi Akademik (Siakad) Berbasis Web Kepada Mahasiswa di Universitas Kapuas Sintang terlihat belum dilaksanakan secara maksimal. Hal tersebut ditandai dengan kurangnya Koordinasi yang kurang baik antara unit atau instansi terkait yang dapat menyebabkan tumpang tindih tanggung jawab, ketidakjelasan

prosedur, dan penundaan dalam penerbitan dokumen administrasi dalam pelaksanaan Siakad.

2. Tahap interpretasi/pemahaman dalam proses implementasi kebijakan Pelaksanaan Sistem Informasi Akademik (Siakad) Berbasis Web Kepada Mahasiswa di Universitas Kapuas Sintang masih terlihat belum optimal. Hal tersebut terlihat petugas belum sepenuhnya memahami tujuan, manfaat, dan prosedur Siakad dan kurangnya pemahaman ini dapat mengakibatkan pelaksanaan yang tidak konsisten menjadi terhambat.
3. Tahap aplikasi atau penerapan dalam proses implementasi kebijakan Sistem Informasi Akademik (Siakad) Berbasis Web Kepada Mahasiswa di Universitas Kapuas Sintang mengalami beberapa kendala antara lain yaitu koneksi internet yang tidak stabil, kurangnya perangkat keras, dan perangkat lunak yang tidak memadai, sehingga dapat menghambat proses penerbitan dokumen administrasi dalam waktu satu hari. Kemudian asyarakat atau petugas pelayanan selalu menghadapi kesulitan dalam menggunakan teknologi digital, mengisi formulir online,

atau memenuhi persyaratan administratif yang rumit.

Rekomendasi yang dapat diberikan agar universitas lebih memperkuat koordinasi internal dan pendampingan teknis kepada pengguna untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan kebijakan ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Albers, B., Shlonsky, A., & Mildon, R. (2020). *Implementation Science 3.0*. Cham: Springer Nature. <https://doi.org/10.1007/978-3-030-27672-0>
- Bauer, M. S., & Kirchner, J. (2020). *Implementation science: What is it and why should I care?*. *Psychiatry Research*, 283, 112546.
- Nilsen, P. (2020). Making sense of implementation theories, models, and frameworks. In P. Nilsen & S. A. Birken (Eds.), *Implementation Science 3.0* (pp. 1-28). Springer Nature.
- Indiahono, D. (2009). *Kebijakan Publik: Berbasis Dynamic Policy Analysis*. Yogyakarta: Gava Media.
- Islamy, M. I. (2009). *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Keputusan Rektor UNKA Sintang Nomor 555.4-175 Tahun 2012 tentang Tim Pengelola Website, Sistem Informasi Akademik (SIKAD), dan Paperless Office (PLO) IPDN Tahun 2012.
- Peraturan Rektor UNKA Sintang Nomor 01 Tahun 2014 tentang Penggunaan Teknologi Informasi dan

Komunikasi di Lingkungan UNKA
Sintang.

Subarsono. (2012). Analisis Kebijakan
Publik Konsep Teori dan Aplikasi.
Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Sugiyono. (2014). Memahami Penelitian
Kualitatif. Bandung: CV. Alfabeta.

Winarno, B. (2012). Teori Kebijaksanaan
Publik. Yogyakarta: Pusat Antar
Universitas Studi Sosial UGM.